

SUMBER BELAJAR PENUNJANG PLPG 2016
MATA PELAJARAN/PAKET KEAHLIAN
SEJARAH INDONESIA

BAB V
JAWA MASA CULTUURSTELSEL
DAN ETISCHE POLITIEKE



Dra. Sri Mastuti, P. M. Hum

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
2016

BAB 5

JAWA MASA CULTUURSTELSEL DAN ETISCHE POLITIEKE

- A. KI :Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu.
 - B. KD : Menguasai materi Sejarah secara luas dan mendalam
 - C. KKD : Menganalisis program penanaman komoditi pertanian di masa Tanam Paksa
Menganalisis dampak politik etis terhadap perkembangan socio-ekonomi di Hindia Belanda
Menerangkan dampak politik pintu terbuka terhadap perkembangan socio-ekonomi di Hindia Belanda
 - D. Materi
- 1. Cultuurstelsel**

Era Cultuurstelsel (tanam paksa) adalah masa penjajahan yang sebenarnya, dalam arti Negara Belanda sebagai Negara induk melakukan kebijakan kolonisasi terhadap Hindia Belanda. Belanda memiliki hak dan kuasa mengeksploatasi Hindia Belanda dengan legal tanpa tentangan dari Negara lain maupun kekuatan di dalam negeri. Dalam hal ini akhirnya Belanda berkuasa penuh atas seluruh wilayah Indonesia (sekarang), adalah "anugrah" karena pada saat yang sama Belanda sedang mengalami krisis keuangan akibat operasi-operasi militer yang dilancarkan baik di Hindia Belanda maupun di Belanda. Perang Jawa (1825-1830) berhasil menguras sebagian besar keuntungan Belanda yang didapat dari eksploitasi Jawa (tengah dan timur)

Sementara Jawa merupakan daerah andalan sebagai "ladang" emas akibat kesuburan tanah dan ketersediaan tenaga kerja yang melimpah. Jawa sekali lagi harus dapat mendatangkan keuntungan, tidak hanya untuk mengganti keuntungan yang hilang karena "perkara Jawa" tetapi yang lebih penting adalah untuk mendukung operasi militer di negeri Belanda karena munculnya Revolusi Belgia pada 1830. Perang ini tentu membutuhkan biaya yang sangat besar dan harus tersedia dalam waktu yang relative singkat. Belanda berusaha untuk menaklukkan Belgia pada 1831-1832, namun gagal. Dengan terpaksa Belanda mengakui kemerdekaan Belgia pada 1839 .

Perang Jawa, meskipun terjadi lebih dahulu dari kasus Belgia, perang ini berhasil menguras hampir seluruh keuntungan yang diperoleh Belanda di tanah jajahan. Berlarut-larutnya pertempuran dengan medan tempur yang sangat lebar

serta keterbatasan penguasaan medan perang oleh pihak Belanda memaksa Belanda mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk mengatasi masalah tersebut. Kerugian yang diderita harus segera diatasi dan dikembalikan, maka Belanda terus memikirkan bagaimana mempercepat perolehan keuntungan yang hilang tersebut.

Beragam pendapat dan pemikiran diajukan untuk mengatasi masalah financial tersebut, pada akhirnya pilihan jatuh pada usul van Den Bosch (1829) yang dirasa paling maksimal untuk mengembalikan kerugian yang diderita. Usulan tersebut diajukan kepada Raja Belanda dan diterima. Dan untuk memastikan bahwa usulan itu dapat dilaksanakan dan menghasilkan keuntungan seperti yang dijanjikan van Den Bosch diangkat sebagai Gubernur Jendral Hindia Belanda (1830-1833). Januari 1830 van Den Bosch tiba di Jawa untuk mengemban misi memastikan ide-idenya terlaksana dan mengeluarkan Belanda dari masalah keuangan.

System cultuurstelsel adalah penerapan kembali eksploitasi sumber daya alam dalam bentuk penyerahan wajib seperti yang pernah dilakukan VOC. Kegagalan system pajak tanah dijadikan alasan utama van Den Bosch untuk sekali lagi menerapkan system serah wajib atas komoditas tanaman yang dapat diekspor dan mendatangkan keuntungan maksimal. Ciri khas cultuurstelsel adalah kewajiban bagi rakyat Jawa untuk membayar pajak dalam bentuk natura berupa hasil pertanian mereka. Syarat dan ketentuan culttuurstelsel tertuang dalam Staatsblad (Lembaran Negara) tahun 1834 no. 22.

Dalam praktek cultuurstelsel berbeda dengan syarat dan ketentuan tertulisnya. Di atas kertas ketentuan cultuurstelsel tidak terlihat merugikan rakyat, sebaliknya, rakyat akan diuntungkan. Berdasarkan ketentuan hanya sepertiga lahan (sawah) rakyat yang akan dipergunakan untuk tanaman komersil, dalam pelaksanaannya lahan y diperuntukkan bagi rakyat hanya sepertiga, sedana duapertiganya untuk tanaman komersil. Dalam ketentuan kegagalan panen karena factor alam dan hama akan ditanggung pemerintah colonial, tetapi pada kenyataannya semua kegagalan panen harus ditanggung oleh petani.



Gambar sistem cultuurstelsel (www.berpendidikan.com)

Cultuurprocenten adalah insentif yang diberikan kepada pegawai Belanda maupun penguasa pribumi Bupati dan kepala desa agar mereka melaksanakan tugas dengan baik. Cultuurprocenten adalah tambahan bagian tertentu apabila para pejabat berhasil melampaui target produksi yang telah ditetapkan. Karena tidak ada aturan pelaksanaan tentang peningkatan produksi maka para pejabat mengambil langkah mudah dengan memperluas areal tanam. Secara tradisional para petani adalah klien (bawahan) para penguasa desa (patron) sehingga mereka harus mematuhi pimpinan (patron) mereka. Konsep inilah yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan eksploitasi. Dengan cara demikian eksploitasi pedesaan Jawa dilakukan secara besar-besaran dan terstruktur, keuntungan besar terjamin. Pemerintah colonial berhasil mendapatkan komoditi ekspor dalam jumlah yang banyak dan berkelanjutan.

Perubahan sosial terjadi di pedesaan Jawa. Tuntutan administrative memaksa pejabat colonial Belanda harus berada di "lapangan" untuk menjamin keterlaksanaan program. Keberadaan pegawai Belanda Eropa di tengah perkebunan akhirnya memaksa pejabat Jawa untuk mendampingi. Suatu hal yang belum pernah terjadi sebelumnya pada masyarakat Jawa. Pada budaya Jawa pedesaan hanya pejabat desa yang berinteraksi langsung dengan rakyat/petani, pejabat di atas kepala desa/lurah hanya mengeluarkan perintah yang akan dikerjakan oleh pejabat dibawahnya. Cultuurstelsel mengubah tradisi tersebut, mulai era itu rakyat dapat berinteraksi langsung dengan pejabat berwenang atau dalam hal ini interaksi

buruh dan majikan terjadi secara massif. Hal itu juga berarti penjajahan atas Jawa (Indonesia) adalah nyata, pegawai Eropa sebagai “tuan” benar-benar ada dan “memerintah” tanah Jawa (Indonesia)

Dengan segera pengaruh kebijakan cultuurstelsel atas Belanda dapat dirasakan. Keuangan Belanda menjadi stabil, Belanda berhasil membayar hutang yang dibuatnya selama kasus Belgia, bahkan Belanda dapat membiayai pembangunan negaranya dan meningkatkan kemakmuran rakyatnya. Perekonomian Belanda tumbuh dengan signifikan, Belanda tidak lagi menjadi Negara yang terbelakang dan miskin di Eropa. Namun demikian apa yang dialami Belanda tidak terjadi di pedesaan Jawa. Cultuurstelsel yang di atas kertas sangat ideal, dalam pelaksanaannya sebaliknya, penderitaan rakyat Jawa segera terlihat.

Sepuluh tahun setelah pemberlakuan cultuurstelsel masalah segera nampak. Penderitaan rakyat Jawa terutama pada wilayah perkebunan tebu segera tampak. Terjadi kekurangan beras sebagai akibat areal penanaman padi yang menyusut bahkan tidak ada sama sekali. Ketersediaan beras sebagai bahan pakan utama penduduk Jawa tidak hanya karena kurangnya areal tanam tetapi juga tidak terawatnya tanaman padi akibat penduduk diminta merawat tanaman tebu. Perawatan tanaman tebu menyita waktu penduduk sehingga mereka tidak punya waktu lagi untuk mengurus tanaman padi.

Kelangkaan padi membuat harga jual padi menjadi mahal, gejolak harga tidak terkendali. Tahun 1844 terjadi gagal panen akibat hama, disusul bencana kelaparan di Grobogan dan Cirebon. Wabah penyakit berjangkit hampir di seluruh pesisir utara Jawa. Tahun 1849-1850 wabah kelaparan meluas di Jawa Tengah, sementara dalam situasi buruk itu pemerintah colonial melakukan kenaikan pajak.

Kesengsaraan dan penderitaan rakyat pribumi memunculkan beragam reaksi dari berbagai kalangan pula. Keputusan rakyat pribumi diwujudkan melakukan pembakaran ladang tebu, menolak membayar pajak, kabur dari perkebunan sampai melakukan gerakan kekerasan terhadap pejabat desa maupun pegawai Belanda. Di pihak Belanda juga muncul kritik setelah penderitaan pribumi Jawa dipublikasikan di Belanda. Douwes Dekker yang pernah menjadi Resident Lebak dan Probolinggo melalui karyanya Multatuli mengungkapkan kesaksiannya atas penderitaan pribumi Jawa. Penentangan terhadap kebijakan cultuurstelsel

muncul, terutama setelah kelompok liberal memenangkan mayoritas kursi pada parlemen Belanda. Kaum liberal yang terdiri dari pengusaha dan orang-orang kaya menuntut penghentian cultuurstelsel dan peran pemerintah yang sangat dominan di tanah jajahan.



Gambar penanaman wajib kopi (kisanak.wordpress.com)

Kelompok liberal mendesak dilakukannya pembaharuan dalam mengelola tanah jajahan yaitu dengan mengurangi peran pemerintah terutama dalam urusan perekonomian tanah jajahan, dihapusnya pembatasan bagi pihak swasta untuk mengeksploitasi tanah jajahan dan pengakhiran pemerasan dan penindasan terhadap rakyat pribumi. Namun demikian tidak mudah memaksa pemerintah mewujudkan tuntutan kelompok liberal. Setelah melalui serangkaian perdebatan yang panjang disepakati cultuurstelsel akan dihapus secara bertahap, mulai dari komoditi yang paling sedikit mendatangkan keuntungan. Secara berturut penghapusan cultuurstelsel diberlakukan atas lada 1862, cengkih dan pala 1864, nila, the dan kayu manis 1865, dan tembakau 1866; sementara kopi dan tebu adalah komoditi terakhir yang dihapuskan melalui pengelolaan cultuurstelsel karena kedua tanaman ini adalah komoditi yang paling menguntungkan.

2. Politik Pintu Terbuka

Agrarische Wet (UU Agraria) 1870 menandai dimulainya era liberal di Jawa. Pengelolaan Jawa tidak lagi monopoli pemerintah, kini pihak swasta memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan eksploitasi. UU itu juga menjamin

kebebasan dan keamanan pengusaha perkebunan. Dalam ketentuan yang berlaku hanya orang-orang Hindia Belanda (Indonesia) dan pemerintah yang diijinkan memiliki tanah. Pemerintah sebagai pemilik tanah dapat menyewakan kepada pengusaha asing atau Belanda dengan jangka waktu sewa 75 tahun, sementara pihak pribumi yang memiliki tanah diijinkan menyewakan tanahnya selama 5 sampai 20 tahun. Dengan demikian mulai berlakunya UU Agraria 1870 sampai awal 1900 di Hindia Belanda marak dengan munculnya usaha agroindustri.

Tidak hanya Jawa, wilayah luar Jawa juga mulai dikembangkan untuk usaha perkebunan dan pertambangan. Selesaiannya terusan Suez menyusul pembukaan terusan itu untuk kapal-kapal non militer memangkas jarak tempuh Eropa-Asia sekaligus memicu perkembangan perhubungan laut. Perkembangan agroindustri swasta dengan dukungan transportasi laut (Koeniglijk Paketvaart Maschapij KPM) yang dikelola pemerintah Belanda mendorong pertumbuhan perekonomian berbasis agroindustri. Ekspor Hindia Belanda pada tahun 1860 baik pemerintah maupun swasta memiliki nilai sama, tetapi pada 1885 nilai ekspor pihak swasta sepuluh kali lipat nilai ekspor pemerintah. Secara keseluruhan nilai ekspor Hindia Belanda tahun 1885 adalah dua kali lipat dari nilai tahun 1860. Keberadaan orang-orang sipil Eropa meningkat pesat dari 17.285 pada tahun 1852 menjadi 62.477 pada tahun 1900. Periode liberal adalah periode peningkatan eksploitasi Hindia Belanda secara besar-besaran (Ricklef, 2001:269-270)

Jaman liberal juga berarti masa ketika alat tukar uang menjangkau lebih ke pedalaman Hindia Belanda terutama pada masyarakat Jawa. Semua ini akibat system sewa tanah yang mewajibkan pembayaran berupa uang, selain itu usaha perkebunan memperkenalkan uang melalui system pengupahan atas buruh yang bekerja di perkebunan-perkebunan besar.

Keberadaan perkebunan besar mendorong munculnya usaha sector jasa yaitu ekspor-impor. Industry ekspor merupakan penggerak perekonomian Hindia Belanda dan berpengaruh terhadap sector ekonomi lainnya. Keberadaan industry itu tidak lepas dari meningkatnya permintaan pasar Eropa akan komoditi (pertanian dan pertambangan) dari Negara-negara koloni. Komoditi primadona yang terus mengalami peningkatan permintaan adalah gula, kopi, tembakau, karet, dan barang-barang tambang seperti timah, bauxite dan lain-lain.

Prinsip ekonomi liberal adalah kebebasan ekonomi tanpa campur tangan pemerintah serta penghapusan semua unsure paksaan. Kaum liberal yakin apabila perekonomian dibiarkan bebas maka akan berjalan menuju ke taraf yang lebih baik, kebebasan berarti siapa saja memiliki kesempatan berusaha yang sama, hal itulah yang akan mendorong perkembangan ekonomi. Liberalism menunjukkan keberhasilannya dalam hal perkembangan industry khususnya ekspor yang berkembang pesat. Ketersediaan capital dalam jumlah besar dengan dukungan system keuangan (bank) yang solid perkebunan-perkebunan di Hindia Belanda berhasil mengembangkan usahanya. Modal membuat perkebunan dapat menggunakan tehnologi baru hasil Revolusi Industri untuk memaksimalkan produktifitas mereka. Pada tahun 1870 luas areal perkebunan tebu di Jawa adalah 54.176 bau, luas areal perkebunan tebu mengalami peningkatan yaitu menjadi 128.301 bau pada 1900. Produksi gula meningkat dari 2.440.000 pikul pada 1870 menjadi 12.050.544 pikul pada tahun 1900. Hal yang sama terjadi pada perkebunan teh, khususnya setelah perkebunan-perkebunan tersebut membudida yakan tanaman the yang berasal dari Assam. Tembakau mengalami hal yang sama, bahkan sempat memiliki harga yang sangat bagus dan sangat terkenal di Eropa (Notosusanto, 1984: 124-125)



HET VORMEN DER SUIKERRIETSTEKKEN UIT DE TOPPEN VAN DE STENGELS
OP HET TERREIN VAN EENE SUIKERFABRIEK. JAVA.

Gambar pabrik gula di Jawa (www.willemsmithistorie.nl)

Komoditi dagang lainnya yang dihasilkan perkebunan-perkebunan besar yang telah mengalami perkembangan pesat selama masa ini adalah kopi dan kina. Selama jaman liberal Hindia Belanda menjadi Negara penghasil kina yang paling terkemuka di dunia, karena hamper 90% dari kina yang digunakan di dunia pada

waktu itu berasal dari perkebunan-perkebunan kina di Jawa. Sayangnya kopi tidak lagi menjajikan keuntungan yang bagus seperti selama masa cultuurstelsel meskipun kopi Jawa Barat sangat terkenal.

Harga kopi dan gula jatuh setelah tahun 1885, sehingga keuntungan yang diperoleh juga menurun secara signifikan. Tahun 1891 menyusul harga tembakau jatuh di pasar internasional. Jatuhnya harga tembakau cukup serius sehingga membahayakan kelangsungan hidup perkebunan-perkebunan tembakau di Deli. Jatuhnya harga gula terutama disebabkan oleh munculnya pesaing gula tebu yaitu gula bit yang dibudidayakan di Eropa. Budidaya tanaman bit di Eropa memangkas ongkos kirim sehingga komoditas baru itu dapat menyaingi gula dari Hindia Belanda.

Penurunan keuntungan akibat turunnya harga komoditas berimbas terhadap jasa keuangan atau perbankan yang hidup dari perkebunan. Kredit macet menjadi ancaman yang akan menjatuhkan lembaga keuangan di Hindia Belanda. Untuk menghindari kejatuhan semua usaha perekonomian (perusahaan perkebunan dan lembaga perbankan) perlu dilakukan perubahan mendasar untuk menyelamatkan perekonomian Hindia Belanda. Keputusan yang diambil pemerintah Hindia Belanda adalah melakukan merger atas perkebunan yang dimiliki perseorangan menjadi sebuah perseroan terbatas yang dikendalikan oleh manager profesional bukan oleh pemilik perkebunan. Pemilik perkebunan akan menjadi pemegang saham yang memiliki hak memilih dewan direksi yang akan mengawasi kinerja perkebunan yang dijalankan oleh sang manajer. Dengan demikian perbankan tetap dapat menyalurkan kreditnya dengan resiko yang lebih kecil. Namun pihak perbankan kemudian juga melakukan pengawasan terhadap perusahaan perkebunan sehingga salah urus, ketidakefisienan operasi perkebunan-perkebunan besar dapat diminimalisir. Bank-bank di Hindia Belanda tidak lagi beroperasi secara mandiri, tetapi menjadi bagian dari bank-bank yang berkedudukan di Belanda.

Perkembangan usaha perkebunan yang pesat dan sangat menguntungkan, ternyata hanya dinikmati para pengusaha dan pemerintah Belanda. Rakyat pribumi tetap masih berada dalam kemiskinan. Kemakmuran seperti yang didengungkan kaum liberal atas penduduk pribumi tidak terwujud. Widjojo Nitisastro

dalam penelitiannya tentang pertumbuhan penduduk Hindia Belanda setelah 1880 memperlihatkan adanya penurunan laju pertumbuhan penduduk (Notosusanto, 1984: 128) Di pihak lain ketersediaan produksi pangan mengalami sedikit penurunan dari pertumbuhan penduduk. Ini berarti pertumbuhan penduduk Jawa tidak diiringi pertumbuhan produksi pangan, seperti yang sudah diramalkan Malthus bahwa suatu hari pertumbuhan penduduk akan melampaui pertumbuhan produksi pangan sehingga kelangkaan pangan menjadi niscaya

Penurunan kesejahteraan penduduk pribumi Jawa dilaporkan oleh Mindere Welvaarts Commisie (Komisi Kemerosotan Kemakmuran) yaitu suatu badan yang dibentuk pemerintah colonial Hindia Belanda untuk menyelidiki tingkat kemakmuran penduduk pribumi. Hasil penyelidikannya menyatakan bahwa pada awal abad ke-20 pendapatan rata-rata rumah tangga Jawa berkisar f.80 untuk satu tahun, dari jumlah itu kurang lebih f.16 harus dibayarkan kepada pemerintah sebagai pajak, sehingga pendapatan sebenarnya adalah f.64/thn atau f.5,3/bln jumlah yang sangat kecil

Penurunan kemakmuran penduduk Jawa tidak hanya disebabkan penurunan usaha perkebunan besar Belanda tetapi juga karena sebab-sebab lain. Pertama adalah meningkatnya penduduk Jawa setelah Perang Jawa dengan tidak diikuti perluasan areal lahan pertanian untuk pangan. Kedua adanya system kerja rodi baik untuk pejabat colonial maupun pejabat pribumi sebagai patron mereka. Petani tidak memiliki motivasi kerja keras karena mereka paham bahwa hasil kerja mereka tidak dapat mereka nikmati. Ketiga adalah kebijakan politik colonial yang menjadikan Jawa sebagai tulang punggung financial untuk daerah-daerah lain yang dikuasai Belanda. Keempat adalah system pajak regresif yaitu system perpajakan yang memberatkan kelompok berpendapatan rendah yang sebagian besar adalah pribumi tetapi di pihak lain menguntungkan kelompok berpendapatan tinggi (mayoritas Eropa) karena rendahnya pajak yang harus mereka tanggung. Kelima adalah krisis yang melanda perkebunan pada tahun 1885 (Notosusanto 1984: 129-131)

3. Politik Etis

Cultuurstelsel berhasil membawa Belanda keluar dari belitan kesulitan dan menikmati masa makmur bertahun-tahun setelah itu. Tidak demikian halnya dengan Hindia Belanda terutama penduduk pribuminya. Penduduk Hindia Belanda harus bekerja keras agar Hindia Belanda menghasilkan banyak uang yang dipakai sebagai jaminan hidup negeri Belanda. Garis kebijakan politik tersebut banyak menuai kecaman terutama dari kelompok humanis. Mereka berpendapat tidak seharusnya hal itu dilakukan, Belanda harus membayar kembali “jasa baik” yang telah diberikan penduduk Hindia Belanda. Van Dedem mengusulkan dilakukannya pemisahan pembukuan agar dapat dihitung dengan jelas pemasukan dan pengeluaran dari Hindia Belanda karena selama ini tercatat jadi satu. Van Kol menyebut pengelakan pengakuan “jasa” Hindia Belanda sebagai politik immoral atau tidak tahu diri

De Waal menghitung jumlah hutang Belanda 236 juta gulden termasuk hutang VOC beserta bunganya, pengeluaran setelah 1800 oleh Belanda untuk Hindia Belanda. Sementara Hindia Belanda pada 1815-1863 menyumbang sebesar 507,5 juta gulden. Menurut perhitungan van Der Berg dari 236 juta gulden, beban Hindia Belanda paling banyak 96 juta, tetapi negeri Belanda mengambil lebih banyak sehingga pada 1884 Hindia Belanda masih berhak menerima 528 juta gulden, dan apabila diperhitungkan dengan bunga maka Hindia Belanda berhak menerima 1585 juta gulden (Notosusanto, 1984: 13)

Van Deventer dalam artikel yang dimuat dalam majalah De Gids tahun 1899 menyebutkan bahwa jutaan yang dihasilkan oleh Hindia Belanda sebagai Een Eerschuld (hutang kehormatan). Jumlahnya menurut van Deventer 823 juta gulden, tanpa memperhitungkan jumlah yang diperoleh sebelum 1867 ketika masih dalam satu pembukuan. Setelah keluarnya Comptabiliteits Wet tahun 1867 pemisahan keuangan resmi dilakukan sehingga perlu pengembalian hasil yang dipungut sejumlah 187 juta gulden (Notosusanto, 1984: 14)

Kecaman-kecaman terhadap pemerintah Belanda mendorong munculnya pemikiran “balas budi”. Pemikiran tentang balas budi tersebut sebagian besar muncul dari kalangan humanitarisme, sosial-demokrat dan politik etis. Dalam pidato tahun 1901 Ratu Belanda menyatakan bahwa “negeri Belanda memiliki kewajiban

untuk mengusahakan kemakmuran serta perkembangan sosial dan otonomi dari penduduk Hindia Belanda”(Notosusanto, 1984: 35). Tekanan pada penduduk menunjukkan bahwa adanya pengakuan terhadap hak penduduk pribumi Hindia Belanda.

Perkembangan perekonomian sekitar tahun 1900, yaitu penurunan keuntungan ekonomis dari komoditi kopi dan tebu karena serangan penyakit berhasil mempercepat perubahan haluan politik. Kemajuan pesat industry perkebunan sejak 1870 dengan jutaan keuntungan yang diperoleh justru memundurkan perusahaan-perusahaan pribumi. Dalam hal ini negeri Belanda harus memperhatikan kepentingan penduduk pribumi dan membantu mengatasi kesulitan di Hindia Belanda. Politik Etis dilaksanakan dengan pemberian bantuan sebesar f.40 juta gulden

Politik Etis membawa perubahan cara pandang terhadap Hindia Belanda. Hindia Belanda adalah daerah yang harus dikembangkan sehingga dapat memenuhi keperluannya dan meningkatkan budaya rakyat pribumi. Politik Etis yang dimulai dengan politik kesejahteraan adalah akibat berbagai pemberitaan tentang kemerosotan hidup rakyat. Kuyper secara tegas menyatakan untuk mengganti system eksploitasi dengan sistem perwalian. Peradaban pribumi harus ditingkatkan, untuk itulah tugas misi yaitu “mengadabkan bangsa pribumi”

Selama periode 1900-1914 terlihat sikap “lunak” pemerintah colonial terhadap gerakan yang mengusung cita-cita kemerdekaan. Pemerintah colonial berusaha mencari wadah yang tepat agar keinginan-keinginan colonial dan pribumi dapat berdampingan untuk mencapai suatu kesatuan politik. Sampai tahun 1925 pemerintah colonial telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menunjukkan “kepercayaan” kepada pihak pribumi melalui desentralisasi, perubahan pemerintahan, perbaikan kesehatan masyarakat, emigrasi, perbaikan pertanian dan peternakan, pembangunan irigasi, dan lalu lintas (Notosusanto, 1984: 40)

Upaya pembangunan yang dilakukan pemerintah colonial Hindia Belanda selain karena tuntutan Politik Etis juga untuk memenuhi kebutuhannya sendiri yang semakin menuntut efisiensi. Demi menjaga keuntungan besar yang diinginkan tanah jajahan harus menyesuaikan diri dengan tuntutan komunikasi dan transportasi yang luas dan cepat. Peningkatan kesejahteraan penduduk pada

gilirannya juga akan meningkatkan pendapatan pemerintah karena perputaran uang yang makin menjangkau masyarakat luas membawa keuntungan tersendiri bagi lembaga-lembaga keuangan.

Pemerintah colonial Hindia Belanda dalam sepuluh tahun pertama 1900-an mengeluarkan berbagai peraturan guna mempercepat peningkatan kesejahteraan penduduk. Lembaga-lembaga yang memudahkan penduduk pribumi untuk memperoleh dan menyalurkan uangnya didirikan seperti bank perkreditan, pegadaian, lumbung desa, bank koperasi, sementara kerja paksa atau rodi berangsur-angsur dihapuskan.

Di bidang pendidikan terjadi peningkatan jumlah sekolah dengan signifikan. Meskipun tujuan pendirian sekolah adalah untuk mendapatkan tenaga kerja terdidik dan murah sekolah berhasil menjadi sarana pemunculan kesadaran akan hak dan persamaan hak. Sekolah yang didirikan pemerintah colonial pada awalnya hanya untuk kalangan Eropa dan Belanda, kemudian terbuka untuk para anak bangsawan. Politik Etis dengan tuntutan peningkatan kesejahteraan penduduk pribumi berhasil memunculkan sekolah-sekolah rakyat untuk kalangan bangsawan rendahan sehingga transformasi pemikiran modern menjangkau rakyat pribumi. Pada akhir abad ke-19 terdapat 721 sekolah rendah dengan jumlah murid 131.000. Tahun 1907 Sekolah Kelas 2 (sekolah ongko loro) diperluas dengan didirikannya Sekolah Kelas 1 (sekolah ongko siji) yang telah mengajarkan bahasa Belanda. Dan pada tahun 1912 Sekolah Kelas 1 diubah menjadi HIS (Holland Inlandsche School) yaitu sekolah dasar untuk anak pribumi dengan bahasa pengantar bahasa Belanda. Demikian juga untuk jenjang pendidikan di atas SD perluasan pendidikan juga dilakukan secara berangsur-angsur, tahun 1902 STOVIA (sekolah dokter Hindia), tahun 1913 didirikan NIAS (Nederlandsch Indiesche Artsen School: sekolah kedokteran). Tahun 1927 STOVIA secara berangsur-angsur ditransformasikan menjadi sekolah tinggi kedokteran (Geneeskundige Hogeschool) dan pada 1936 STOVIA dihapus sehingga sekolah kedokteran tinggal NIAS (Ricklef, 2001: 329-334)



Gambar HIS di Sumenep Madura (id.wikipedia.org)

Perluasan pendidikan di kalangan pribumi meningkatkan jumlah pribumi terdidik yang secara tidak langsung meningkatkan kesadaran identitas. Kaum terdidik berusaha menyebarkan gagasan-gagasan itu melalui beragam saluran, dan salah satunya adalah pers atau surat kabar. Surat kabar telah dikenal di Hindia Belanda sejak 1800, tetapi semuanya masih diterbitkan dalam bahasa Belanda sehingga pembacanyapun sangat terbatas. Perluasan pendidikan pribumi dengan pengantar bahasa Melayu memunculkan surat kabar berbahasa Melayu. Keberadaan surat kabar berbahasa Melayu mempercepat dan meluaskan penyebaran ide-ide kebangsaan.

Kesejahteraan rakyat yang menjadi sasaran Politik Etis termasuk hal kesehatan rakyat. Bidang ini menjadi tanggungjawab Dinas kesehatan Umum dan bagian dari Departemen Pendidikan. Beberapa hal yang dilakukan berkenaan dengan upaya pencegahan dan pengobatan penyakit menular yang harus dilakukan oleh pegawai pemerintah. Sebelum adanya dokter Jawa pada tahun 1851 selaku petugas kesehatan adalah para pamong praja, mereka itu yang melakukan pencacaran dan penyuntikan apabila terdapat suatu wilayah yang penduduknya terinfeksi. Akibat wabah cacar tahun 1911 pemerintah mulai mendirikan rumah sakit, apotik, dan dilakukan gerakan pencacaran oleh para dokter dan mantra. Hasilnya adalah menurunnya angka kematian penduduk menjadi tidak lebih 20 kematian tiap 1000 penduduk

Secara tidak langsung kebijakan-kebijakan Politik Etis memunculkan elite intelektual baru yang memahami identitasnya serta sangat menyadari keterbelakangan masyarakat pribumi. Gerakan-gerakan yang kemudian dimunculkan kelompok intelektual ini melalui pertemuan, perdebatan, rapat terbuka, pidato dan lain-lain merupakan kekuatan sosial baru

Lahirilah pergerakan nasional di seluruh penjuru Hindia Belanda. Gerakan ini membuka mata pemerintah colonial Hindia Belanda akan munculnya kekuatan baru yang berasal dari dalam dan memiliki cita-cita hidup bebas (kemerdekaan). Bahwa gerakan itu kemudian ada yang menjadi radikal karena diskriminasi yang dilakukan oleh Belanda dengan pemerintahan kolonialnya sementara cita-cita kemerdekaan dimotivasi oleh kesejahteraan yang dicita-citakan.

KEPUSTAKAAN

- Locher-Scholten, Elsbeth. 1996. *Etika Yang Berkeping-keping. Lima Telaah Kajian Aliran Etis dalam Politik Kolonial 1877-1942*. Jakarta: Djambatan
- Marwati Djoened P & Nugroho N. 1984. *Sejarah Nasional Indonesia IV dan V*. Jakarta: Balai Pustaka
- Ricklef, M.C. 2004. *Sejarah Modern Indonesia 1200-2004*. Yogyakarta: Pusta Pelajar
- Sartono Kartodirjo, 1987. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru Jilid I dari Emporium ke Imperium*. Jakarta: Gramedia